

ABSTRAK

Sri Widia. NIM 1198040081. 2023: *Implementasi Pemikiran Filsafat Politik Hannah Arendt Dalam Optimalisasi Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Bekasi Periode 2019-2024.*

Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bekasi terlihat masih belum berjalan dengan optimal, terlambatnya fasilitas bilik aduan perlindungan ditempat kerja yang baru diberikan setelah *viral*-nya kasus *staycation* tempo lalu menjadi salah satu indikasi bahwa 11 Kursi keterwakilan perempuan yang ada saat ini belum fokus. Sebagai wakil dari 3,2 juta rakyat yang tinggal di wilayah industri raksasa dengan status peringkat nomor satu dalam kasus kekerasan perempuan dan anak tertinggi se-Jawa Barat tahun 2023 ini, wakil rakyat khususnya perempuan di DPRD Kabupaten Bekasi perlu memperkuat fokus dalam keterwakilannya.

Penelitian ini berfokus pada optimalisasi keterwakilan perempuan yang berada di DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024, dengan tujuan hendak mengetahui bagaimanakah kondisi keterwakilan perempuan tersebut dan faktor apa saja yang menghambat optimalitasnya. Penelitian ini menggunakan teori Filsafat Politik *Vita Contemplativa* (Esensi) dan *Vita Activa* (Aksi) dari Hannah Arendt, teori ini berbicara tentang Esensi dan Aksi yang harus berjalan ketersalingan. Berdasarkan teori tersebut, penulis mencoba merelvensikannya dengan keterwakilan perempuan yang ada di DPRD Kabupaten Bekasi. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi bersama anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara Reduksi data, Penyajian data, Penarikan Kesimpulan.

Adapun hasil temuan menunjukkan bahwa pertama: peningkatan kondisi keterwakilan perempuan secara kuantitas tidak selalu linear dengan kualitasnya, kedua: adanya fenomena 'kuota pelengkap' mendevaluasi esensi (*vita contemplativa*) dari keterwakilan perempuan tersebut, ketiga: aksi (*vita activa*) yang ada belum terkonsolidasi dengan baik, sebab tidak semua Aleg perempuan menaruh konsen pada urgensi perempuan, belum dibentuknya Kaukus Perempuan Parlemen (KKP) yang mampu mengkoordinir pengarusutamaan tersebut.

Kata Kunci: Politik Perempuan, keterwakilan, Esensi dan Aksi.